



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dibutuhkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan, telah dilakukan evaluasi terhadap sifat, jenis, dan beban kerja dalam menentukan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. bahwa evaluasi dan penyesuaian kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa pengaturan mengenai kelas jabatan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 510) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 510) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWAT 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 230

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| NO | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN |
|----|---|---------------|
| 1 | Sekretaris Kementerian | 17 |
| | Deputi | |
| 2 | Staf Ahli | 16 |
| 3 | Staf Khusus Menteri | 15 |
| 4 | Inspektur | 15 |
| | Asisten Deputi | |
| | Sekretaris Deputi | |
| | Kepala Biro | |
| | Kepala Sekretariat KPAI | |
| 5 | Kepala Bagian | 13 |
| | Kepala Bidang | |
| 6 | Kepala Subbagian | 10 |
| | Kepala Subbidang | |
| 7 | Perencana Ahli Utama | 14 |
| | Analisis Kebijakan Utama | |
| | Auditor Utama | |
| 8 | Pranata Komputer Ahli Utama | 13 |
| | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama | |
| | Penerjemah Ahli Utama | |
| | Arsiparis Ahli Utama | |
| | Penyuluh Hukum Utama | |
| | Pustakawan Utama | |
| 9 | Perencana Ahli Madya | |
| | Analisis Anggaran Ahli Madya | |

| NO | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN |
|----|--|---------------|
| | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya Analis SDM Aparatur Ahli Madya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya Analis Kebijakan Madya Auditor Madya | 12 |
| 10 | Pranata Komputer Ahli Madya Analis Hukum Ahli Madya Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Pekerja Sosial Ahli Madya Penerjemah Ahli Madya Arsiparis Ahli Madya Penyuluh Hukum Madya Penyuluh Sosial Madya Statistisi Madya Pranata Hubungan Masyarakat Madya Psikolog Klinis Madya Analis Kepegawaian Madya Auditor Kepegawaian Madya Pustakawan Madya | 11 |
| 11 | Analis Anggaran Ahli Muda Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Analis SDM Aparatur Ahli Muda Perencana Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Analis Kebijakan Muda Auditor Muda | 10 |
| 12 | Pranata Komputer Ahli Muda Analis Hukum Ahli Muda Penerjemah Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Perawat Ahli Muda Pekerja Sosial Ahli Muda Arsiparis Ahli Muda Penyuluh Hukum Muda Penyuluh Sosial Muda Statistisi Muda Pranata Hubungan Masyarakat Muda Psikolog Klinis Muda Analis Kepegawaian Muda Auditor Kepegawaian Muda Pustakawan Muda Dokter Pertama | 9 |

| NO | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN |
|----|---|---------------|
| | Dokter Gigi Pertama Pranata Keuangan APBN Penyelia Penata Laksana Barang Penyelia Auditor Penyelia | |
| 13 | Pranata Komputer Ahli Pertama Perencana Ahli Pertama Analis Anggaran Ahli Pertama Analis Hukum Ahli Pertama Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama Analis SDM Aparatur Ahli Pertama Manggala Informatika Ahli Pertama Apoteker Ahli Pertama Penerjemah Ahli Pertama Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Pekerja Sosial Ahli Pertama Perawat Ahli Pertama Arsiparis Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Penyuluh Hukum Pertama Penyuluh Sosial Pertama Analis Kebijakan Pertama Statistisi Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Pertama Pustakawan Pertama Psikolog Klinis Pertama Analis Kepegawaian Pertama Auditor Kepegawaian Pertama Auditor Pertama Pranata Komputer Penyelia Pustakawan Penyelia Analis Kepegawaian Penyelia Arsiparis Penyelia Perawat Penyelia Terapis Gigi dan Mulut Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata SDM Aparatur Penyelia Asisten Apoteker Penyelia Pranata Keuangan APBN Mahir Penata Laksana Barang Mahir | 8 |
| 14 | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Pustakawan Pelaksana Lanjutan Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan | |

| NO | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN |
|----|--|---------------|
| | Arsiparis Pelaksana Lanjutan | 7 |
| | Auditor Pelaksana Lanjutan | |
| | Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan | |
| | Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan | |
| | Pranata Keuangan APBN Terampil | |
| | Terapis Gigi dan Mulut Mahir | |
| | Pranata SDM Aparatur Mahir | |
| | Perawat Mahir | |
| | Analisis Rencana Program dan Kegiatan | |
| | Analisis Perencanaan Anggaran | |
| | Analisis Kerja Sama | |
| | Analisis Hubungan Antar Lembaga | |
| | Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | |
| | Analisis Data dan Informasi | |
| | Analisis Sistem Informasi dan Jaringan | |
| | Perancang Grafis | |
| | Penyusun Rancangan Perundang-undangan | |
| | Analisis Hukum | |
| | Analisis Advokasi Hukum | |
| | Analisis Produk Hukum | |
| | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi | |
| | Penyusun Berita dan Pendapat Umum | |
| | Analisis Berita | |
| | Analisis Publikasi | |
| | Konselor | |
| | Analisis Pengaduan Masyarakat | |
| | Komediator | |
| | Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat | |
| | Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur | |
| | Analisis Perencanaan SDM Aparatur | |
| | Analisis Kinerja | |
| | Analisis Pengembangan Kompetensi | |
| | Analisis Kerjasama Diklat | |
| | Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur | |
| | Analisis Keuangan | |
| | Penata Keuangan | |
| | Bendahara | |
| | Analisis Laporan Keuangan | |
| | Pranata Laporan Keuangan | |
| | Penyusun Naskah Rapat Pimpinan | |
| | Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana | |
| | Analisis Organisasi | |

| NO | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN |
|----|---|---------------|
| | Analisis Jabatan Analisis Tata Laksana Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Analisis Integrasi Proses Bisnis Analisis Pengawasan Penata Laporan Keuangan Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Analisis Perlindungan Perempuan Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Analisis Protokol Analisis Sistem Informasi Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan Pengawas Perpustakaan | |
| 15 | Pranata Komputer Pelaksana Pustakawan Pelaksana Arsiparis Pelaksana Auditor Pelaksana Asisten Apoteker Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Penata Laksana Barang Terampil Terapis Gigi dan Mulut Terampil Perawat Terampil Pranata SDM Aparatur Terampil Pengelola Administrasi Pemerintahan Pengelola Sistem dan Jaringan Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Pengelola Dokumentasi Penata Liputan Pengelola Perpustakaan Pranata Acara Pengelola Perjalanan Dinas Petugas Protokol Pengelola Media Center dan Kemitraan Media Pengelola Pengaduan Publik Pengelola Data Laporan dan Pengaduan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pengelola Kepegawaian Pengelola Gaji Pengelola Keuangan Verifikator Keuangan Pengelola Database Surat Perintah Membayar | 6 |

| NO | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN |
|----|---|---------------|
| | Verifikator Data Laporan Keuangan | |
| | Pengelola Surat | |
| | Sekretaris | |
| | Pranata Barang dan Jasa | |
| | Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik | |
| | Pengelola Barang Milik Negara | |
| | Pengelola Bangunan Gedung | |
| | Pengelola Kendaraan | |
| | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | |
| | Pengelola Rumah Tangga | |
| | Pengelola Sarana dan Prasarana | |
| | Pengelola Pemantauan | |
| 16 | Pranata Komputer Pelaksana Pemula | 5 |
| | Perawat Pelaksana Pemula | |
| | Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana Pemula | |
| | Pengadministrasi Umum | |
| | Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media | |
| | Pengadministrasi Keuangan | |
| | Pengadministrasi Persuratan | |
| | Pengemudi VIP | |

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

